BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL, MEDIA SOSIAL, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI, DAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pelecehan Seksual

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini memiliki beberapa padanan, antara lain peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum (Safitri, 2025, hal. 35). Menurut Moeljatno, tindak pidana dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya. Dengan kata lain, perbuatan pidana merupakan tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum dan pelanggarannya dikenai ancaman pidana. Lebih lanjut, Moeljanto menekankan bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan konkret, yaitu suatu keadaan faktual yang timbul akibat perilaku seseorang dan menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut (Moeljatno, 2018, hal. 59).

Suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Unsur Subjektif, yaitu elemen yang melekat pada pelaku atau yang berhubungan langsung dengan segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya.
- b. Unsur Objektif, yaitu elemen yang berkaitan dengan aspek eksternal atau keadaan lahiriah saat tindak pidana tersebut dilakukan, yang berada di luar kondisi batin pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, implikasi untuk penelitian ini adalah bahwa pemahaman tindak pidana dapat dijadikan landasan teoritis dalam menilai suatu perbuatan memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana. Selain itu, pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat memberikan kerangka konseptual dalam menganalisis keterkaitan antara hukum pidana dengan asas praduga tidak bersalah yang menjadi titik fokus penelitian ini.

2. Definisi Pelecehan Seksual

Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh KOMNAS Perempuan, pelecehan seksual adalah tindakan yang mengandung unsur seksual, baik melalui kontak fisik maupun tanpa kontak fisik yang menargetkan organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud juga termasuk perilaku seperti bersiul, bermain mata, pernyataan verbal yang

bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi atau keinginan seksual, mencolek atau menyentuh bagian tubuh tertentu, juga gestur atau isyarat seksual yang menimbulkan ketidaknyamanan, tersinggung, perasaan direndahkan martabatnya, hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Definisi pelecehan seksual tersebut kemudian diperkuat secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menjadi instrumen hukum komprehensif dalam menanggulangi berbagai bentuk kekerasan seksual. Undang-Undang ini mengklasifikasikan pelecehan seksual ke dalam dua bentuk, yakni pelecehan seksual fisik dan non-fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1).

Kehadiran UU TPKS sekaligus memberikan legitimasi yuridis bagi upaya penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual. Hal ini menjadi penting untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada korban, tetapi juga menjaga keseimbangan dalam penghormatan terhadap hak-hak terduga pelaku. Analisis lebih lanjut akan dibahas secara komprehensif pada Bab IV.

Adapun implikasi untuk penelitian ini adalah bahwa definisi pelecehan seksual yang dirumuskan dalam naskah akademik serta diperkuat oleh ketentuan UU TPKS menjadi dasar normatif dan yuridis untuk menilai suatu perbuatan sebagai pelecehan seksual. Pemahaman ini menjadi relevan karena penyebaran identitas terduga pelaku

pelecehan seksual melalui media sosial perlu penanganan yang adil dan proposional. Artinya, di satu sisi diperlukan perlindungan terhadap korban, sementara di sisi lain hak asasi bagi terduga pelaku tetap harus dilindungi melalui penerapan asas praduga tidak bersalah.

B. Tinjauan Umum Media Sosial

1. Definisi Media Sosial

Media sosial merupakan *platform digital* yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi penggunanya, sekaligus untuk membangun interaksi sosial melalui pertukaran informasi (Yusuf et al., 2023, hal. 2). Dalam hal kebutuhan manusia akan informasi, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan individual secara alamiah, media sosial menyediakan konten yang dihasilkan oleh pengguna, yang dapat diakses oleh individu lain sebagai sumber pengetahuan. Keunggulan utama media sosial terletak pada fleksibilitasnya, karena dapat digunakan kapan saja dan di mana saja, selama terdapat koneksi internet. (Putri, 2023, hal. 15).

Implikasi untuk penelitian ini adalah bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang yang berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu, termasuk dalam hal hukum pidana. Aksesibilitas dan kecepatan penyebaran informasi memungkinkan identitas seseorang dengan mudah tersebar tanpa melalui proses verifikasi yang tepat. Hal ini menimbulkan tantangan bagi penerapan asas praduga tidak bersalah,

karena opini publik dapat terbentuk lebih cepat daripada proses hukum yang seharusnya.

2. Pengaturan Media Sosial

Dalam hal perlindungan kepentingan publik dari dampak negatif media sosial, diperlukan penegasan peran negara. Media sosial yang dapat diakses secara luas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, eksploitasi seksual, hingga pelanggaran privasi individu dengan penyebaran data pribadi. Oleh karena itu, peran negara bukan hanya bersifat represif setelah terjadi pelanggaran, melainkan juga preventif dengan menyediakan instrumen hukum yang mampu mengatur tata kelola informasi digital secara adil dan proporsional.

Sebagai bentuk konkret dari upaya tersebut, negara telah mengatur mekanisme penyebaran informasi elektronik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini mempertegas kewenangan pemerintah untuk melakukan pengendalian konten digital dalam media sosial. Lebih lanjut, pengaturan mengenai media sosial juga bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menegaskan bahwa setiap penyebaran informasi yang memuat identitas seseorang tanpa persetujuan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini menjadi penting dalam hal pencegahan

penyebaran identitas terduga pelaku tindak pidana, termasuk kasus pelecehan seksual, yang dapat merugikan individu secara sosial maupun hukum jika informasi tersebut tidak didukung oleh bukti dan prosedur hukum yang sah.

Implikasi untuk penelitian ini adalah kebutuhan untuk menilai sejauh mana instrumen hukum yang sudah ada mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan publik dan hak individu. Penelitian ini tidak hanya menyoroti efektivitas regulasi dalam mengendalikan pertukaran informasi di media sosial, tetapi juga menekankan pentingnya penerapan asas praduga tidak bersalah sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana.

C. Tinjauan Umum Perlindungan Data Pribadi

1. Definisi Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “data” diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan kajian. Sementara itu, istilah “pribadi” merujuk pada manusia sebagai individu atau entitas perorangan. Dengan demikian, data pribadi dapat dipahami sebagai informasi yang bersifat benar dan nyata serta melekat pada individu sebagai subjek yang dapat diidentifikasi secara personal.

Merujuk pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi didefinisikan sebagai setiap informasi yang berkaitan dengan seseorang,

baik yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung, secara tersendiri atau melalui penggabungan dengan informasi lain, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik (Saly et al., 2023, hal. 1709). Implikasi untuk penelitian ini adalah bahwa pemahaman mengenai data pribadi dalam hal penyebaran informasi di media sosial, khususnya ketika menyangkut identitas terduga pelaku tindak pidana seperti pelecehan seksual.

2. Jenis-Jenis Data Pribadi

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang proporsional berdasarkan tingkat sensitivitas informasi yang dikandungnya. Data pribadi yang bersifat spesifik mencakup informasi yang secara inheren sensitif dan berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap hak privasi individu apabila disalahgunakan. Jenis data ini meliputi data dan informasi terkait kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, data pribadi yang bersifat umum mencakup informasi yang lebih lazim ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak selalu bersifat sensitif, namun tetap memerlukan perlindungan hukum. Data ini meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan,

agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Implikasi untuk penelitian ini adalah bahwa perbedaan klasifikasi data pribadi tersebut memiliki relevansi dalam penyebaran identitas terduga pelaku pelecehan seksual melalui media sosial. Data pribadi yang bersifat spesifik, seperti catatan kejahatan atau informasi kesehatan, apabila dipublikasikan tanpa dasar hukum yang jelas, dapat menimbulkan stigma sosial, diskriminasi, bahkan pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah. Di sisi lain, meskipun data pribadi yang bersifat umum tampak tidak terlalu sensitif, penyebarannya tetap berpotensi merugikan individu ketika dikaitkan dengan status sebagai “terduga pelaku.” Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi, baik yang bersifat spesifik maupun umum, harus dipandang penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dalam memperoleh informasi dan perlindungan hak individu untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji bagaimana perlindungan data pribadi di Indonesia.

3. Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia

Penggunaan data pribadi telah menjadi komponen krusial dalam mendukung kelancaran berbagai aktivitas digital, seperti transaksi elektronik dan pengelolaan informasi. Namun demikian, di balik kemajuan tersebut, justru membuka celah bagi berbagai potensi

penyalahgunaan data, seperti pencurian identitas, pengintaian tanpa persetujuan, hingga penyebaran data pribadi yang melanggar hak privasi.

Kejahatan yang menyangkut data pribadi semakin meningkat seiring meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital. Berdasarkan laporan dari *Tempo.co*, selama periode 2020–2021 terjadi enam insiden besar kebocoran data pribadi di Indonesia, antara lain kebocoran 279 juta data peserta BPJS Kesehatan, 2,9 juta data pelanggan Cermati, 1,1 juta data pelanggan Lazada, penjualan 463 ribu data nasabah BRI Life, 91 juta data akun pengguna Tokopedia, dan 2,3 juta data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Fakta tersebut menegaskan pentingnya regulasi yang memberikan perlindungan hukum atas data pribadi masyarakat. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang memiliki kedudukan fundamental sekaligus menjadi bagian esensial dari hak atas perlindungan diri individu. Hak ini berfungsi untuk menjamin terpeliharanya privasi setiap orang melalui pengamanan terhadap data pribadi yang melekat pada warga negara (Angraini K et al., 2024, hal. 46). Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, negara hadir melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai kerangka hukum khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai subjek, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan data pribadi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU PDP, perlindungan data pribadi didefinisikan sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi (Hummerson, 2024, hal. 126).

Selain itu, perlindungan data pribadi di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun UU ITE tidak secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai perlindungan data pribadi seperti UU PDP, namun keberadaannya menjadi landasan hukum awal yang memberikan pengakuan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi dalam aktivitas elektronik.

Implikasi dalam penelitian ini adalah bahwa bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya berfungsi mencegah praktik kebocoran maupun pencurian data semata, tetapi juga berperan penting dalam menanggulangi penyalahgunaan data di ruang digital, termasuk penyebaran identitas individu melalui media sosial. Hal ini menjadi relevan ketika identitas seseorang yang tengah berhadapan dengan proses hukum diungkap secara terbuka, karena praktik demikian berpotensi melanggar hak privasi dan bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Dengan demikian, keberadaan UU PDP sebagai regulasi khusus, yang dilengkapi oleh ketentuan dalam UU ITE, memberikan

landasan hukum yang lebih kuat untuk menjamin perlindungan data pribadi sekaligus menjaga prinsip keadilan dalam penegakan hukum.

D. Tinjauan Umum Asas Praduga Tidak Bersalah

1. Definisi Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menjamin setiap individu yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke pengadilan tetap diperlakukan sebagai tidak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini menjamin perlindungan hak asasi manusia dengan menegaskan bahwa hukuman tidak dapat dijatuhkan tanpa bukti yang sah dan proses hukum yang adil. Konsekuensinya, aparat penegak hukum dituntut untuk bersikap objektif, tidak memihak, serta memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk membela diri (Syarif et al., 2024, hal. 112). Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah menjadi pilar penting dalam menjamin keadilan prosedural dan menegakkan prinsip kemanusiaan dalam penegakan hukum pidana (Yunita, 2011, hal. 64).

Mardjono Reksodiputro menegaskan bahwa asas ini merupakan inti dari *due process of law* dengan sejumlah elemen mendasar, yaitu perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang aparat negara, penegasan bahwa hanya pengadilan yang berwenang menentukan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa, kewajiban melaksanakan persidangan secara terbuka, serta jaminan hak-hak tersangka dan

terdakwa untuk membela diri (Reksodipruto, 1995, hal. 36). Aspek positifnya terletak pada perlindungan hak asasi manusia, sebab setiap tindakan yang diambil harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sehingga resiko terjadinya kesalahan dalam proses pemeriksaan menjadi lebih kecil (Muhammad, 2007, hal. 17).

Implikasi dalam penelitian ini adalah bahwa asas praduga tidak bersalah harus menjadi landasan dalam menilai praktik penyebaran identitas terduga pelaku pelecehan seksual melalui media sosial. Sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *due process of law*, hanya pengadilan yang berwenang menentukan kesalahan atau ketidaksalahan seseorang. Dengan demikian, memperlakukan individu yang masih berstatus terduga seolah-olah telah bersalah melalui penyebaran identitasnya di ruang publik tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan esensi asas praduga tidak bersalah itu sendiri. Atas dasar ini, penelitian berupaya menelaah sejauh mana penerapan asas tersebut dapat membatasi praktik penyebaran identitas terduga pelaku agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan prosedural dan perlindungan hak asasi.

2. Pengaturan Asas Praduga Tidak Bersalah di Indonesia

Di Indonesia, asas praduga tidak bersalah tidak termuat secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui satu pasal khusus. Meskipun demikian, Penjelasan Umum angka 3 huruf c Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan definisi asas praduga tidak bersalah.

Asas ini juga dimuat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas proses peradilan yang adil. Dalam hal ini, asas praduga tidak bersalah merupakan bagian dari upaya menjamin keadilan bagi setiap orang yang terlibat dalam proses hukum. Dengan demikian, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, asas praduga tidak bersalah tetap mendapat pengakuan dalam sistem hukum Indonesia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjadi bagian penting dalam perlindungan terhadap hak asasi serta pelaksanaan proses hukum yang adil.

Implikasi dalam penelitian ini adalah bahwa pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam berbagai instrumen hukum di Indonesia menegaskan kedudukannya sebagai asas yang harus dijunjung tinggi dalam setiap tahapan proses peradilan. Meskipun tidak tercantum secara eksplisit, asas ini merupakan jaminan bagi perlindungan hak asasi manusia.

E. Irisan dan Potensi Konflik Norma

Peraturan Perundang-Undangan	Unsur Delik	Objek Perlindungan	Sanksi	Konsekuensi Pembuktian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	<p>Unsur subjektif: barang siapa, dengan sengaja.</p> <p>Unsur objektif: perbuatan merampas, dan akibatnya nyawa orang lain</p>	Nyawa manusia; Hak Individu; Keamanan negara.	Tidak mengatur sanksi pidana secara langsung, karena itu diatur di KUHP. Namun, terdapat konsekuensi sanksi jika aparat penegak hukum melanggar KUHAP, seperti pemeriksaan oleh Provos, penolakan perkara oleh majelis	Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan pasal 183 KUHAP, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan

		<p>hakim di pengadilan. Sedangkan sanksi pidana yang biasa dijatuhkan sesuai KUHP meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.</p>	<p>sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi hal-hal berikut: a. Dua alat bukti yang sah; b. Ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.</p>
--	--	--	--

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	Perbuatan dengan unsur kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, atau penyalahgunaan kekuasaan yang bernuansa seksual, termasuk pelecehan, eksploitasi, dan pemaksaan,	Harkat dan martabat manusia dari segala bentuk kekerasan seksual, termasuk perlindungan terhadap korban mulai dari pencegahan, perlindungan, akses keadilan, hingga pemulihan hak korban.	Pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan.	Sistem pembuktian tetap menerapkan prinsip di mana hakim memberikan putusan berdasarkan keyakinan yang dibangun dari alat bukti yang diajukan. Selain itu, UU TPKS juga memberikan perlindungan lebih besar bagi korban dalam proses pembuktian, sehingga lebih memudahkan korban untuk membuktikan perbuatan kekerasan seksual yang dialaminya.
Undang-Undang	Memperoleh atau	Data tentang orang	Sanksi administratif	Berfokus pada pembuktian

<p>Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)</p>	<p>mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; Mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum; Menggunakan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum; Membuat</p>	<p>perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.</p>	<p>tif dan sanksi pidana (pidana penjara dan pidana denda)</p>	<p>unsur-unsur tindak pidana pelanggaran data pribadi untuk dapat dikenakan sanksi pidana. Pembuktian harus menunjukkan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, yang berupa pengumpulan, pengungkapan, penggunaan, atau pemalsuan data pribadi milik orang lain tanpa hak atau izin sesuai aturan UU PDP.</p>
---	---	--	--	--

	atau memalsukan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian bagi orang lain.			
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi	Penyebaran informasi atau dokumen elektronik bermuatan pencemaran nama baik, penghinaan, hoaks, ujaran kebencian, atau distribusi	Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, kehormatan, nama baik, hak privasi individu, keamanan dalam ruang digital.	Pidana penjara, pidana denda, serta sanksi tambahan.	Pembuktian didasarkan pada alat bukti elektronik, saksi ahli, serta jejak digital. Terdapat potensi multitafsir antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hak orang lain.

dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	konten pribadi tanpa hak.			
--	---------------------------------	--	--	--